

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(INFORMED CONSENT) PADA TINDAKAN *SECTIO CAESAREA*
ANTARA PIHAK RSUD KARANGANYAR DENGAN PASIEN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL**

Adinda Sekar Ayu JS¹, Muhammad Jibril², R.A. Antari Innaka Turingsih³

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pemberian *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* yang dilakukan oleh pihak RSUD Karanganyar kepada pasien JKN dengan Permenkes No. 290 Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pasien JKN yang sudah memberikan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* apabila terjadi malpraktik oleh dokter di RSUD Karanganyar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris sehingga berfokus pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara terhadap seorang narasumber, seorang dokter *obgyn*, dua orang perawat di kamar bersalin, dan tiga orang pasien yang melakukan *sectio caesarea* dengan JKN. Sementara itu, analisis data dilakukan secara kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* kepada pasien JKN di RSUD Karanganyar telah sesuai dengan Permenkes No. 290 Tahun 2008. Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien JKN yang telah memberikan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* apabila terjadi malpraktik oleh dokter di RSUD Karanganyar adalah perlindungan secara internal melalui perjanjian terapeutik dan *informed consent* serta perlindungan secara eksternal melalui SOP Penanganan Pengaduan, mediasi, pelaporan ke MKDKI, serta gugatan ke pengadilan, yang merupakan pengimplementasian ketentuan perlindungan hukum yang diatur peraturan perundang-undangan terkait.

Kata kunci: *informed consent*, *sectio caesarea*, jaminan kesehatan nasional

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

³ Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***IMPLEMENTATION OF APPROVAL FOR MEDICAL ACTIONS
(INFORMED CONSENT) FOR CAESAREAN SECTION BETWEEN
KARANGANYAR REGIONAL HOSPITAL AND NATIONAL HEALTH
INSURANCE PATIENTS***

Adinda Sekar Ayu JS⁴, Muhammad Jibril⁵, R.A. Antari Innaka Turingsih⁶

Abstract

This study aims to determine the suitability of providing informed consent on caesarean section by Karanganyar Regional Hospital to national health insurance patients with Permenkes No. 290 of 2008. This study also aims to determine the protection of national health insurance patients who have given informed consent on caesarean section if malpractice occurs by doctors at Karanganyar Regional Hospital.

The type of this research is normative-empirical so that it focuses on the implementation of related regulations in the field. The data collection techniques used were document study and interviews with a resource person, an obgyn doctor, two nurses in the delivery room, and three patients who performed caesarean section with national health insurance. Meanwhile, the data were analysed qualitatively, which includes the process of data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the research, it can be concluded that the implementation of informed consent on caesarean section to national health insurance patients at Karanganyar Regional Hospital is in accordance with Permenkes No. 290 Tahun 2008. Furthermore, the legal protection to national health insurance patients who have given informed consent on caesarean section if malpractice occurs by doctors at Karanganyar Regional Hospital is internal protection through therapeutic agreement and informed consent and external protection through SOP of Complaint Handling, mediation, reporting to MKDKI, and lawsuit to the court, which is the implementation of the legal protection regulated by related regulations.

Keywords: *informed consent, caesarean section, national health insurance*

⁴ Student of Undergraduate Law Programme, Civil Law Concentration, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁵ Legal Research Advisor, Civil Law Concentration, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁶ Legal Research Advisor, Civil Law Concentration, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.